

WARTA



PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Vol. 11 No. 25/2000

ISSN 0126-4478

Mularsono	1	PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DALAM MENGHADAPI DAYA SAING PRODUK INDUSTRI DI ERA GLOBALISASI
Bambang Ismadi	17	PRASYARAT STRATEGIS PENGEMBANGAN IPTEK DALAM ERA GLOBALISASI
Agus Santoso	28	PROFIL MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN PERMASALAHANNYA, KASUS: DESA TRANS "MEKAR JAYA", KECAMATAN TALO, BENGKULU - SELATAN
Radot Manalu	46	PELUANG DAN TANTANGAN SDM LITBANG PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Bambang Ismadi Agus Santoso	69	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KETERKAITAN ANTARA AGROINDUSTRI DENGAN PEMASOK DALAM Mendukung INOVASI TEKNOLOGI : SUATU TINJAUAN APLIKATIF

**Pusat Analisa Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(PAPIPTEK-LIPI)
Jakarta, 2000**

WARTA

**PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

STT: No. 887/SK/DITJEN/PPG/STT1981



SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab	:	Kepala PAPIPTEK - LIPI
Pemimpin Redaksi	:	Drs. Santosa, MM
Anggota Redaksi	:	Dr. Lukman Hakim Dr. Erman Aminullah Dra. Sumini Abdul Salam,MA Drs. Azis Taba Pabeta,MS Drs. Amir Asyikin Hsb,MS
Sekretaris Redaksi	:	Dedy Saputra,SE,S.Sos
Tata Usaha	:	Vetti Rina Prasetyas,SH

Alamat Redaksi :

PAPIPTEK-LIPI Widya Graha Lt.8,Jl. Jend.Gatot Subroto No.10
Jakarta 21710, Telefax. 5201602, [http: // www.papiptek.lipi.go.id](http://www.papiptek.lipi.go.id)
E-mail : papiptek@hotmail.com

WARTA

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI



Vol. 11 No. 25/2000

ISSN 0126-4478

Mularsono	1	PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DALAM MENGHADAPI DAYA SAING PRODUK INDUSTRI DI ERA GLOBALISASI
Bambang Ismadi	17	PRASYARAT STRATEGIS PENGEMBANGAN IPTEK DALAM ERA GLOBALISASI
Agus Santoso	28	PROFIL MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN PERMASALAHANNYA, KASUS: DESA TRANS "MEKAR JAYA", KECAMATAN TALO, BENGKULU - SELATAN
Radot Manalu	46	PELUANG DAN TANTANGAN SDM LITBANG PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Bambang Ismadi Agus Santoso	69	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KETERKAITAN ANTARA AGROINDUSTRI DENGAN PEMASOK DALAM Mendukung INOVASI TEKNOLOGI : SUATU TINJAUAN APLIKATIF

**Pusat Analisa Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(PAPIPTEK-LIPI)
Jakarta, 2000**

WARTA

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI



Vol. 11 No. 25/2000

ISSN 0126-4478

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	i
1. PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DALAM MENGHADAPI DAYA SAING PRODUK INDUSTRI DI ERA GLOBALISASI Oleh: Drs. Mularsono, MS	1
2. PRASYARAT STRATEGIS PENGEMBANGAN IPTEK DALAM ERA GLOBALISASI Oleh : Drs. Bambang Ismadi	17
3. PROFIL MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN PERMASALAHANNYA, KASUS: DESA TRANS "MEKAR JAYA". KECAMATAN TALO, BENGKULU - SELATAN Oleh : Drs. Agus Santoso	28
4. PELUANG DAN TANTANGAN SDM LITBANG PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Oleh : Radot Manalu, S.Sos	46
5. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KETERKAITAN ANTARA AGROINDUSTRI DENGAN PEMASOK DALAM MENDUKUNG INOVASI TEKNOLOGI : SUATU TINJAUAN APLIKATIF Oleh: Drs. Bambang Ismadi & Drs. Agus Santoso	69

PENGANTAR REDAKSI

Pada dewasa ini pengaruh globalisasi dan liberalisasi pasar dirasakan hampir melanda di segala pelosok dunia, termasuk Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin tumbuhnya sistem pasar lintas negara, meningkatnya keterbukaan dan ketergantungan perekonomian nasional dalam jaringan ekonomi internasional, berkembangnya perusahaan multinasional, meningkatnya volume investasi langsung dan perdagangan lintas negara, serta meningkatnya pangsa produksi dan perdagangan dunia oleh perusahaan multinasional.

Bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, gejala globalisasi mempunyai beberapa konsekwensi penting, khususnya terhadap eksistensi dan sekaligus kemungkinan peluang pengembangan. Produk-produk lokal akan menghadapi persaingan sengit dari produk luar negeri seperti produk-produk Jepang, Korea Selatan dan Republik Rakyat Cina yang masing-masing ingin menguasai pangsa pasar Indonesia.

Gejala tersebut mendorong produk-produk lokal untuk mampu menghadapi tantangan dan sekaligus juga mampu memanfaatkan peluang untuk mencari celah-celah pasar yang bisa menerobos ke pasar global, oleh karena itu daya saing produk-produk lokal perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam terbitan WARTA kali ini ditampilkan tulisan-tulisan yang mengulas tentang bagaimana meningkatkan daya saing baik di bidang produktivitas kerja, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tantangan dan peluang dalam menyongsong penyelenggaraan otonomi daerah.

Tulisan pertama berjudul **“Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Daya Saing Produk Industri Di Era Globalisasi”** oleh Mularsono yang intinya adalah bagaimana dengan keunggulan sumberdaya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang murah dapat menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif.

Tulisan kedua berjudul **“Prasyarat Strategis Pengembangan IPTEK Dalam Era Globalisasi”**, oleh Bambang Ismadi yang intinya bahwa di dalam pengembangan IPTEK diperlukan adanya *Grand Strategy*.

Tulisan ketiga berjudul **“Kebijakan Pengembangan Keterkaitan Antara Agroindustri dengan Pemasok dalam Mendukung Inovasi Teknologi: Suatu Tinjauan Aplikatif**, oleh Bambang Ismadi dan Agus Santoso yang intinya perlu adanya sinkronisasi kebijakan dari instansi teknis khususnya bidang agroindustri yang terkait dengan pemasok dalam rangka mendukung inovasi secara spesifik.

Tulisan berikutnya berjudul **“Peluang Dan Tantangan SDM Litbang Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah”**, oleh Radot Manalu yang intinya dalam implementasi kebijakan otonomi daerah diperlukan adanya dukungan SDM litbang yang profesional.

Adapun tulisan terakhir berjudul **“Profil Masyarakat Transmigrasi dan Permasalahannya: Kasus Desa Trans ‘Mekar Jaya’, Kecamatan Talo, Bengkulu Selatan”**, yang intinya menggambarkan desa transmigrasi Mekar Jaya yang sudah kurang lebih 18 tahun berdiri dengan berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain masih banyaknya *eksodus*.

Mudah-mudahan terbitan warta ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi baik bagi para peneliti kebijakan maupun para praktisi.

Redaksi

PROFIL MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN PERMASALAHANNYA

KASUS : DESA TRANS "MEKAR JAYA", KECAMATAN TALO, BENGKULU - SELATAN

Oleh : Drs. Agus Santoso^{*)}

Abstract

This article is primarily based on field experience in an early stage of execution of feasibility studies of action research series undertaken by Iptekda Program of PAPIPTEK-LIPI 1997/98. The purpose is to describe Desa "Mekar Jaya" transmigrant profile, in terms of human resources, population, education, employment, and income aspects; natural resources, geographical condition and land-use potency, and also its infra-/structures. In addition, in accordance with the main purpose of Iptekda Program, namely to empower transmigrant's active participation roles in utilization of appropriate technology in order to increase their welfare, the existing socio-economic or socio-cultural problems should be identified. The results of this early study are expected to be able to contribute to the formulation of comprehensive and holistic transmigration policies.

I. PENDAHULUAN

Desa Mekar Jaya adalah salah satu obyek transmigrasi yang letaknya agak terisolasi dari keramaian kota dalam wilayah Propinsi Bengkulu bagian Selatan dan berada di bawah Kecamatan Talo. Daerah ini masih dapat dianggap sebagai kawasan hutan dan diperkirakan sebagian habitatnya masih ada, terutama babi hutan. Jarak dari Propinsi Bengkulu (Kodya Bengkulu) menuju Kecamatan Talo sejauh \pm 90 km, dapat ditempuh sekitar 2 jam lamanya dengan kendaraan roda empat. Dari Kecamatan Talo menuju Desa Mekar Jaya, sejauh \pm 30 km lagi, bila menggunakan kendaraan yang sama, lama perjalanan sekitar satu setengah jam, karena kondisi jalan yang terjal

^{*)} Ajun Peneliti Muda, Balai Studi Pengelolaan Litbang, PAPIPTEK - LIPI

dan berbantuan. Lokasi penempatan di Desa Mekar Jaya ini, mulai dihuni secara penuh sejak tahun 1982/1983, dengan ditempatkannya sejumlah \pm 400 KK transmigran. Setiap KK masing-masing mendapat bagian 2 (dua) hektar lahan, dan ditambah 1 (satu) buah rumah standar dengan tipe sederhana.

Namun, setelah beberapa tahun menempati lokasi (desa) transmigrasi, kenyataan yang dihadapi sebagian penduduknya banyak diwarnai rasa kegelisahan yang mendalam, merasa tidak betah, sehingga cenderung untuk meninggalkan desa. Padahal jauh sebelum mereka ditempatkan, sudah diberikan suatu wawasan atau pandangan atau arahan dari pemerintah mengenai seluk beluk sebagai orang transmigran. Antara lain, terdapat 3 (tiga) pandangan pokok (Rambat Nur Sasongko, 1993:87) yang seharusnya benar-benar dipahaminya di lokasi penempatan yang menentukan orientasi untuk menghadapi kehidupan. Pertama, pandangan "dinamis progresif", yakni : pandangan hidup yang melihat program transmigrasi sebagai suatu investasi masa depan yang lebih baik. Dengan transmigrasi orang akan lebih maju, karena dapat membuka lahan pertanian untuk kehidupan yang lebih baik daripada berdesak-desakan di daerah asalnya semula. Mereka juga memandang bahwa transmigrasi cukup membawa berkah bagi kehidupan, dan hal itu harus diperjuangkan. Kedua, pandangan "statis nrimo", yakni : pandangan yang melihat program transmigrasi sebagai suatu jalan hidupnya (nasib seseorang). Mereka memandang dirinya adalah orang yang dibuang. Oleh karena itu, mereka bertransmigrasi hanya sekedar menjalankan takdir hidup. Yang terpenting, "mangan ora mangan asal kumpul" dalam kelompok-kelompok desa asal transmigran. Mereka tidak beranggapan bahwa transmigrasi ini dapat meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Dengan begitu, mereka justru hanya mengandalkan uluran bantuan pemerintah untuk *supply* kebutuhan hidupnya. Mereka bekerja atau bertani bukan karena motivasi kuat yang timbul dari dalam dirinya, melainkan hanya karena ikut-ikutan saja. Pandangan demikian ini dikemukakan orang-orang yang kurang memiliki wawasan luas. Ketiga, pandangan "destruktif", yakni pandangan yang melihat program transmigrasi hanya sebagai "batu loncatan" saja. Bagi mereka, yang terpenting adalah memiliki tanah dan coba-coba bertani : kalau berhasil jalan terus, tetapi kalau gagal, pulang ke daerah asal. Orientasi pemikiran mereka adalah cenderung pulang kampung (*homesickness*), artinya meskipun secara fisik jasmaniah mereka berada di lokasi transmigrasi, namun secara rohaniah pikirannya selalu kembali ke daerah asal.

Nampaknya niat untuk meninggalkan desa begitu kuatnya, akhirnya secara berangsur-angsur mereka pergi hingga jumlah penduduknya terus berkurang, terlihat dari 400 KK (awal trans - 1983), kini tersisa 207 KK (Oktober 1998) yang masih tetap bertahan, berarti sekitar 50 % transmigran telah meninggalkan desanya. Hal ini disebabkan oleh sulitnya mengelola dan mengembangkan budidaya pertanian pangan secara efektif, disamping masalah pemasaran. Sekalipun terdapat lembaga kemasyarakatan yang didirikan bersama-sama untuk menampung dan memasarkan hasil pertanian, seperti KUD, ternyata lembaga tersebut kurang berperan-aktif, bahkan nyaris bubar, akibat konflik diantara pengurus dan anggota. Padahal, peran KUD merupakan satu-satunya wahana yang memacu kelancaran roda perekonomian desa guna meningkatkan penghasilan penduduk. Dengan demikian pertumbuhan perekonomian desa tidak dapat dipertahankan lagi akhirnya kondisi desa semakin lama semakin menurun dan tetap saja kini menjadi desa tertinggal selama \pm 17 tahun.

Apabila ketiga pandangan di atas tadi kembali dicermati, maka bagi sebagian transmigran yang sudah terlanjur pergi meninggalkan desa, dapat dikategorikan ke dalam pandangan *ketiga*, yaitu : mereka yang berpandangan destruktif, karena mereka sudah tidak memiliki keinginan untuk kembali lagi ke lokasi penempatan. Tetapi, di lain sisi, bagi transmigran yang tetap bertahan, mereka bisa juga diklasifikasikan kedalam pandangan *kedua*, yaitu "statis nrimo". Pandangan ini didasari kenyataan dari kecenderungan mereka untuk selalu menunggu bantuan pemerintah, dari sejak awal sampai saat ini.

Pada dasarnya permasalahan transmigrasi di desa ini, kiranya lebih kompleks meskipun berbagai bantuan pernah diberikan, seperti dari Dinas Pertanian, UGM, UNDP dalam bentuk *World Food Program (WFP)*, dan tahun 1998 yang lalu bantuan dari IPTEKDA-LIPI. Namun semua itu tampaknya belum menyelesaikan permasalahan yang ada - justru sebaliknya, menimbulkan berbagai masalah, begitu program bantuan selesai, selesai pula kegiatan desa dan kembali ke suasana yang serba prihatin. Keprihatinan ini bersumber dari permasalahan yang hingga kini masih dirasakan, seperti: lingkungan tidak kondusif; kurangnya sarana/prasarana sosial-ekonomi; banyaknya hama babi hutan;; lokasi jauh dari jalan raya; medannya berat; sanitasi dan air bersih tidak memadai. Kondisi ini tidak kondusif dan sangat sulit untuk menciptakan mata pencaharian demi sesuap nasi, sehingga terkesan bahwa pihak pemerintah cq. Departemen Transmigrasi, dalam menempatkan para transmigran hanya melakukan perencanaan program

transmigrannya saja artinya lebih kepada memindahkan orang dari tempat yang padat ke tempat yang lebih sedikit penduduknya, tanpa di maintain dengan baik bagaimana prospek ke depannya. Pola ini kelihatannya sudah lama dilakukan Dep. Transmigrasi, oleh karena itu jarang sekali program transmigrasi yang berhasil.

Hal ini dibuktikan dari suatu studi Departemen Transmigrasi (1989) yang menunjukkan bahwa program transmigrasi belum mampu memberi kontribusi besar terhadap realisasi program pembangunan, khususnya di daerah pedesaan. Beberapa daerah lokasi transmigrasi justru mengalami penurunan kualitas, misalnya : kerusakan lingkungan alam, urbanisasi ke kodya terdekat ataupun ke kota lain, dan kecemburuan sosial masyarakat pribumi/asli. Adanya dampak tersebut dapat diindikasikan dari faktor penyebabnya, yaitu : tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah (tidak tamat SD), penghasilan yang jauh dari mencukupi, minimnya daya dukung wilayah (fasilitas sosial dan ekonomi) dan infrastruktur lainnya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa program transmigrasi menimbulkan permasalahan yang kompleks, bahkan baru-baru ini dinyatakan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Erna Witoelar, yang telah menyambut baik bila program transmigrasi reguler dihentikan saja, alasannya dinilai program itu lebih banyak menjadi persoalan daripada keberhasilan, meskipun ada sejumlah transmigran yang sukses (Kompas, 7 Des'2000). Lebih lanjut dikatakan "justru yang diharapkan oleh masyarakat adalah transmigrasi lokal bukan transmigrasi yang dipaksakan". Dalam pandangannya, pendekatan pemberdayaan ekonomi itu lebih baik daripada sekedar memberikan jaminan hidup. "Itu jauh lebih sehat daripada masa lalu. Dulu, kan, transmigran dua tahun tergantung pemerintah".

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan menggambarkan beberapa permasalahan pokok, kasus desa "Mekar Jaya" diantaranya : (1) masalah penduduk yang secara evolusi meninggalkan desa, dikarenakan berbagai faktor kendala (2) masalah pendidikan, dimana sebagian besar orang tua hanya terbatas menyekolahkan anak-anaknya hingga tamatan SD saja dan sebagian kecil yang melanjutkan ke tingkat Menengah, (3) masalah penghasilan yang sangat rendah, (4) kondisi SDA (geografis, potensi lahan) dan prasarana, yang kurang kondusif.

II. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Kependudukan

Manusia tidak hanya menjadi konsumen sumber daya alam, tetapi juga berfungsi sebagai sumber daya, yang disebut sebagai sumber daya insani (SDM). Sumber daya yang dapat dimanfaatkan dari manusia ini meliputi : tenaga fisik, fikiran, dan kepemimpinannya (Nursid Sumaatmaja, 1981:213). Maka dari itu, untuk memanfaatkan sumber daya insani yang dimiliki, kini peluangnyapun telah ada di desa/daerah transmigrasi. Sejak masyarakat menginjakkan kakinya di bumi Satuan Pemukiman (SP) II tahun 1982, tepatnya di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu-Selatan. Jumlah orang yang turut-serta atau terdaftar dalam program transmigrasi (pada saat pemukiman pertama) adalah 400 KK, atau sebanyak \pm 2000 jiwa, suatu jumlah potensi sumber daya insani yang cukup besar.

Sesuai kebijakan pemerintah, melalui Direktur Pembinaan Daerah Transmigrasi - Direktorat Jenderal Transmigrasi (Lokakarya Departemen Transmigrasi-BKKBN, 1982:8-11), telah dikeluarkan Landasan Kebijaksanaan Transmigrasi, yang antara lain meliputi : pertama, Landasan Umum, yakni : konstitusional (UU No.3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi beserta Penjelasannya) dan konsepsional (Tap MPR No.IV/ MPR/1978), dan kedua, Landasan Operasional, yakni kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terkandung di dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1978, dan Keputusan-Keputusan Bersama Antar Menteri yang berkenaan dengan transmigrasi. Salah satu sasaran pembinaan daerah transmigrasi adalah pembangunan basis produksi untuk menjamin pertumbuhan sosial-ekonomi masyarakat transmigran dan penduduk sekitarnya dengan menitik-beratkan kepada : Lahan Usaha Tani, yaitu lahan sebagai basis produksi utama yang pada umumnya dititik-beratkan pada usaha tani pangan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup transmigran, maka setiap KK diberi tanah seluas 2 Ha secara bertahap. Pada tahap pertama (saat mereka ditempatkan) diberikan tanah 1 Ha/KK yang sudah siap tanam (lahan kering) dan siap olah (lahan basah/pasang surut). Tanah yang 1 Ha (siap tanam/olah) berupa 0,25 Ha/KK lahan pekarangan dan tempat tinggal, dan 0,75 Ha/KK lahan usaha. Lahan kedua, 1 Ha/KK (lahan usaha) lagi ini, dibuka sendiri oleh transmigran.

Daerah yang digunakan sebagai pemukiman para transmigran ini adalah kawasan hutan yang mempunyai luas keseluruhan \pm 3000 ha. Menurut statistik (Buku Profil Desa Kecamatan Talo) dan informasi dari kepala desa setempat, khusus untuk Desa Mekar Jaya atau disebut SP II, dari luas tersebut apabila dibagi kepada 400 KK di atas dengan masing-masing setiap 1 (satu) KK mendapat jatah 2 (dua) ha, berarti lahan yang dibagikan kepada masyarakat transmigran adalah seluas 800 ha, sedang sisa lahan dipergunakan untuk sarana dan prasarana sosial, misalnya : jalan, mushola, gedung sekolah, balai rakyat, dlsb.. Lalu selebihnya adalah lahan tak bertuan, yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai lahan bebas atau lahan hamparan (seluas lebih dari 2100 ha).

Dari jumlah 400 KK yang ada telah terbagi ke dalam 4 (*empat*) *dusun*, masing-masing adalah dusun *Sumber Mulya, Tri Mulya, Harapan Jaya, dan Wana Jaya*. Keempat dusun tersebut, masing-masing mempunyai jumlah penduduk sebanyak 100 KK, disesuaikan dengan jumlah KK yang ada, dan dengan dikepalai oleh seorang kepala dusun. Setelah menjalani kerasnya kehidupan sebagai transmigran, tidak terasa waktu berjalan cepat, beberapa tahun kemudian timbul berbagai masalah yang menghinggapinya berkaitan dengan mata-pencahariannya. Meskipun setiap KK telah diberi lahan yang cukup luas untuk diolah, namun kenyataan pahit banyak dikeluhkan oleh sebagian penduduknya. Antara lain, lokasi yang digunakan sebagai tempat penampungan transmigran dianggap kurang kondusif, dikarenakan : medan yang cukup berat, jauh dari kota (menuju kantor kecamatan), gangguan hama babi hutan yang masih ganas dan banyak mengancam berbagai jenis tanaman petani, hingga keberadaannya sangat meresahkan, sekaligus juga memperlemah pendapatan petani. Selain itu, kendala lainnya, seperti masalah jalan dan transportasi, serta pemasaran hasil-hasil bumi yang mereka peroleh. Semua ini menjadi persoalan atau masalah bagi sebagian besar penduduk desa.

Permasalahannya dari yang semula berpikir positif penuh dengan cita-cita untuk dapat bertahan hidup lebih lama guna mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, kini telah membuatnya menjadi pesimistik, dikarenakan prospek ekonominya masih jauh dari harapan hingga membuat banyak transmigran cenderung untuk meninggalkan desa. Gangguan pikiran seperti ini begitu cepat berkembang hingga merasuki jalan pikirannya untuk dapat cepat-cepat meninggalkan desanya. Keinginan ini menjadi kenyataan, hingga

berangsur-angsur mereka telah meninggalkan desa tersebut, sampai dengan tahun 1998 lalu, data yang semula menunjukkan jumlah 400 KK (1983), kini hanya terdapat sekitar 207 KK atau 928 jiwa, dengan kepadatan penduduk 35 orang/km². Berarti separohnya, atau 50 persen dari jumlah KK seluruhnya, telah meninggalkan desa. Jumlah yang kini masih bertahan dapat dirinci menurut golongan usia dan jenis kelamin. Menurut jenis kelamin, terdiri dari : laki-laki sebanyak 493 jiwa, dan perempuan 435 jiwa, sedang menurut golongan usianya (secara kumulatif) dapat disebutkan dari mulai usia kurang dari 1 (satu) tahun sampai dengan usia 75 tahun (lihat tabel-1) dan selanjutnya penduduk dilihat menurut suku (asal daerah) [perhatikan Tabel-2].

Tabel-1
Jumlah penduduk dirinci menurut Golongan Umur & Jenis Kelamin

No	Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 12 bulan	12	9	21
2	13 bulan - 4 tahun	27	24	51
3	5 - 6 tahun	25	22	47
4	7 - 12 tahun	56	62	118
5	13 - 15 tahun	34	28	62
6	16 - 18 tahun	36	24	60
7	19 - 25 tahun	76	78	154
8	26 - 35 tahun	83	76	159
9	36 - 45 tahun	60	65	125
10	46 - 50 tahun	29	23	52
11	51 - 60 tahun	40	20	60
12	61 - 75 tahun	15	3	18
13	lebih dari 76 tahun	-	1	1
J u m l a h		493	435	928

Sumber : Profil Desa/Kelurahan (Kecamatan Talo), Kabupaten Bengkulu Selatan, 1997.

Tabel-2
Penduduk menurut suku (asal daerah) di desa transmigrasi SP II

No.	Asal Daerah	Sumber Mulya	Dusun			Total KK	%
			Trimulya	Harapan Jaya	Wana Jaya		
1	Sumatra Utara			5		5	2.42
2	J a m b i			1		1	0.48
3	Bengkulu		1			1	0.48
4	Lampung			1		1	0.48
5	Jawa Barat	29	9	6	13	57	27.54
6	Jawa Tengah	3	31	53	40	127	61.35
7	Jawa Timur	1	5	1		7	3.38
8	Tak terjawab		8			8	3.86
Total :		33	54	67	53	207	100

Sumber : Hasil survei Tim Iptekda, PAPIPTEK-LIPI, 1998.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang berkaitan langsung dengan pemuda, mengingat usia masa muda merupakan usia sekolah. Problem yang terutama muncul adalah penyediaan fasilitas pendidikan, meliputi gedung sekolah, tenaga guru, buku-buku dan lain-lain sarana penunjang pendidikan (Riwanto, 1994:20). Di negara-negara sedang berkembang, tingkat pendidikan yang dicapai penduduk, termasuk penduduk usia mudanya, masih rendah, karena pada umumnya (80 persen) anak-anak meninggalkan bangku sekolah setelah menyelesaikan sekolah dasar tanpa adanya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan (Ibid:20-21). Di Indonesia misalnya, jumlah murid baru di SD pada tahun 1977 sebesar 3.730.935 orang, tapi yang bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pada tahun ajaran 1984/1985 hanya sejumlah 1.017.769 orang (Indikator Iptek, 1996:38). Berarti, sisanya sejumlah 2.713.166 orang anak (72,28 persen), untuk sementara, dianggap tidak dapat melanjutkan. Walaupun ada faktor lain, misalnya karena ditunda atau *droup out*, tapi karena kecil persentasenya, dapat diasumsikan sebagai indikator "tidak bisa melanjutkan". Gejala ini memberi petunjuk kepada kita bahwa proses pendidikan bagi rata-rata siswa di Indonesia masih rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa struktur ekonomi sebagian masyarakat Indonesia masih belum baik, khususnya pada masyarakat desa (transmigrasi).

Seiring dengan itu dari 207 KK atau sebanyak \pm 928 orang transmigran, bila diklasifikasikan ke dalam golongan usia sekolah (dari usia 10 tahun ke atas) terhitung sejumlah : 784 orang. Jumlah ini dapat dikategorikan sebagai penduduk yang berpendidikan. Jumlah tersebut akan sangat bervariasi bila dilihat menurut tingkat pendidikannya, dimulai dari yang tidak tamat SD sampai dengan tingkat akademi. Tampaknya tingkat pendidikan yang dimiliki sebagian besar transmigran adalah tamatan SD. Secara berurutan, untuk tamatan SD jumlahnya mencapai \pm 587 orang (74,87 persen), terdiri dari : 316 (laki-laki) dan 271 (perempuan), tamat SLTP : 99 orang (12,63 persen); tamat SLTA : 59 orang (7,53 persen); tingkat Akademi 6 orang (0,76 persen), dan selebihnya adalah tidak tamat SD sebanyak 33 orang (4,21 persen), (*lihat Tabel-3*). Satu hal yang perlu dicermati, dari tamatan SD sebanyak 587 orang (74,87 persen) adalah terdiri dari anak-anak dan orang dewasa, sedang 117 orang (19,93 persen) tergolong murid yang masih aktif (melanjutkan) sekolah, baik di SD; SLTP maupun SLTA, kalau dilihat persentasenya jauh lebih besar murid-murid yang masih di bangku SD, selisihnya sejumlah 470 orang (59,94 persen) adalah kelompok anak-anak dan orang tua, ada yang tamat SD dan juga tidak tamat SD.

Persoalan mendasar bagaimana dengan nasib masa depan anak-anak setelah tamat SD nanti ? Karena diperkirakan belum secara pasti mereka dapat melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan, mengingat penghasilan orang tua mereka yang amat minim. Umumnya masalah penghasilan sebagian besar masih jauh dari mencukupi. Bila dikaitkan dengan masalah pendidikan anak, jelas beban hidup mereka menjadi semakin bertambah berat, sebab untuk memenuhi kebutuhan pangan saja sangat sulit belum lagi kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, sangatlah mudah untuk dimaklumi bila anak-anak transmigran, sebagai bagian dari anak generasi penerus bangsa ini, umumnya hanya bisa mengenyam pendidikan tamatan SD saja, sedangkan yang dapat melanjutkan ke jenjang sekolah menengah hanya sebagian kecil.

Tabel - 3
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin

No	Uraian	Jumlah	%	Jenis Kelamin	
				Laki-laki	Perempuan
1	Tidak tamat SD	33	4,21	- *)	- *)
2	Tamat SD	587	74,87	316	271
3	Tamat SLTP	99	12,63	54	45
4	Tamat SLTA	59	7,53	39	20
5	Tamat Akademi	6	0,76	-*)	- *)
Jumlah :		784	100	410	339

Sumber : Profil Desa (Kecamatan Talo) - 1997, diolah oleh PAPIPTEK-LIPI.

*) data tidak tersedia

3. Pekerjaan dan Penghasilan

Pada tahun 1997 lalu, berdasarkan data sekunder yang didapat, jumlah penduduk Desa Mekar Jaya diketahui sebanyak 928 orang, ternyata penduduk usia kerja yang masih dapat diberdayakan ataupun yang masih bisa bekerja secara produktif hanya berjumlah 550 orang, dari jumlah tersebut dapat diketahui pekerjaan utamanya sebagian besar sebagai petani, yaitu sekitar 513 orang (93,27 persen) selebihnya 37 orang (6,83 persen) dimana mereka juga berkerja-rangkap sebagai pegawai, seperti : guru sebanyak 8 orang; pegawai negeri sipil (PNS)/ABRI 1 orang; mantri kesehatan/perawat 1 orang; bidan 1 orang; PNS lainnya 1 orang; pensiunan ABRI/sipil 2 orang, dan karyawan swasta 2 orang . Sedang di bidang jasa, seperti warung sebanyak 11 orang, jasa angkutan seperti mobil angkutan atau kendaraan umum 1 orang, jasa ketrampilan (tukang kayu) sebanyak 5 orang; tukang batu 2 orang, dan tukang jahit/bordir 2 orang [perhatikan **Tabel-4**]. Kendatipun pekerjaan utamanya sebagai petani, kenyataan menunjukkan betapa sulitnya kehidupan sehari-hari mereka dengan hanya mengandalkan pendapatannya dari hasil-hasil pertanian. Kesulitan yang dialami sebagian besar adalah tertumpu pada modal usaha, selain itu ketrampilan bertani yang

dimilikinyapun rata-rata masih sangat rendah, baik dari segi ilmu pengetahuan (teoritis) maupun prakteknya (teknis).

Kesulitan lain yang sangat berarti adalah segi pemasaran hasil-hasil pertanian yang sama sekali belum mendukung, terutama prasarana jalan belum memadai (medannya berat dan cukup jauh) dari kota, sehingga masalah transportasi menjadi kendala. Selain itu, KUD yang diharapkan sebagai basis roda perekonomian desa sama sekali tidak berperan atau nyaris bubar. Berakibat berbagai hasil pertanian yang ada sejauh ini tidak terorganisir dengan baik bahkan mereka cenderung melakukan penjualan hasil pertanian/perkebunan sendiri-sendiri ke pasar terdekat atau ke kota (kabupaten). Jika semua ini dikaitkan dengan masalah penghasilan mereka, yang jelas selama ini penghasilannya masih rendah atau belum layak (lihat Tabel-5).

Tabel-4
Pekerjaan penduduk menurut sektor jasa/perdagangan

No.	Sektor/Jenis Jasa/Perdagangan	Jumlah (orang)
1.	Jasa Pemerintahan/Non-Pemerintahan :	
	a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12
	1. Guru	8
	2. PNS/ABRI	1
	3. Mantri Kesehatan/Perawat	1
	4. Bidan	1
	5. PNS Lainnya	1
	b. Pensiunan ABRI/Sipil	2
	c. Pegawai/Karyawan Swasta	2
2.	Jasa Perdagangan :	
	a. Warung	11
3.	Jasa Komunikasi :	
	a. Mobil/Kendaraan Umum	1 *)
4.	Jasa Keterampilan :	
	a. Tukang Kayu	5 *)
	b. Tukang Batu	2 *)
	c. Tukang Jahit/Bordir	1 *)
J u m l a h :		37

*) pekerjaan tambahan sebagai petani

Sumber : Profil desa, Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan, 1997.

Tabel-5
Rata-rata penghasilan per tahun penduduk Desa Mekar Jaya

No	Rata-rata pendapatan per tahun	Dusun :				Total	%
		Sumber Mulya	Trimulya	Harapan Jaya	Wana Jaya		
1	100.000 - 360.000	4	-	1	3	8	3.86
2	361.000 - 720.000	1	2	1	6	10	4.83
3	721.000 - 1.080.000	5	3	4	6	18	8.70
4	1.081.000 - 1.440.000	2	5	4	3	14	6.76
5	1.441.000 - 1.800.000	19	21	18	27	85	41.06
6	1.801.000 - 2.880.000	2	4	14	2	22	10.63
7	2.881.000 - 4.800.000	-	8	21	6	35	16.91
8	4.801.000 s/d. 6.000.000	-	3	3	-	6	2.90
9	Tak terjawab	-	8	1	-	9	4.35
Jumlah KK		33	54	67	53	207	100

Sumber : Hasil survei Tim Iptekda, PAPIPTEK-LIPI, 1998.

III. SUMBER DAYA ALAM (SDA)

1. *Kondisi Geografis*

Secara visual kondisi geografis *Desa Mekar Jaya* merupakan daerah perbukitan/ pegunungan yang mempunyai luas \pm 3000 ha dengan ketinggian tempat dari permukaan laut : 250 m. Dari wilayah seluas itu, penggunaannya, antara lain, diperuntukkan : pemukiman umum seluas 100 ha, bangunan-bangunan, yang terdiri dari : kantor desa, sekolah, tempat peribadatan (mesjid, gereja, pura, wihara), pemakaman, jalan, dan lain-lain seluas 25 ha. Penggunaan lainnya, untuk : lahan pertanian 13,5 ha; ladang/tegalan 600 ha; perkebunan (rakyat) 71 ha; dan hutan produksi : 2100 ha. Kemudian, lahan juga dipergunakan untuk : kegiatan olah raga seluas 1,5 ha, dan perikanan darat/air tawar seluas 3 ha.

Permasalahannya bahwa sumber air yang digunakan untuk perawatan tanaman masih tergantung sepenuhnya pada turunnya hujan (tadah hujan),

sedang penggunaan air sungai masih bersifat sementara, kecuali bagi petani yang memang lokasi lahan pertaniannya atau tanamannya dekat dengan air sungai, secara langsung dapat memanfaatkannya. Sementara air minum yang digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, umumnya mereka peroleh dengan menampung air hujan, karena curah hujannya memang cukup tinggi. Sedangkan untuk mandi dan cuci dari air sungai, jika mengharapkan air sumur sangat tergantung dari lokasi, jenis tanah, dan mata air sedang jenis tanahnya sebagian besar *podzolik merah kecoklatan*, artinya secara geologis jenis tanah seperti ini tidak memiliki air tanah dalam. Oleh sebab itu, penduduk sangat kesulitan mendapatkan sumber air sumur, terpaksa menggunakan air sungai, yang dialirkan ke sebuah lubang/kolam buatan (sebagai penampung/*reservoir*) melalui saluran/pipa/talang, ke rumah masing-masing.

Permasalahan lain adalah daerah-daerah yang dianggap cukup rawan terhadap bahaya erosi yang sewaktu-waktu dapat mengancam penduduk desa. Erosi yang ada terbagi kedalam beberapa tingkat, masing-masing *erosi ringan* seluas 100 ha; *erosi sedang* seluas 150 ha, dan *erosi berat* seluas 100 ha. Gangguan lainnya adalah terdapatnya sekitar 800 ha tanah yang mengandung unsur hara dengan kedalaman yang kurang dari 500 cm. Mengenai masalah erosi, pengalaman menunjukkan bahwa disini pernah terjadinya erosi, barangkali akibat daripada curah hujan yang cukup tinggi. Selain itu, yang memprihatinkan disebabkan adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja membat pohon-pohon besar di hutan dan hasilnya dijual untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini jelas merusak kelestarian lingkungan yang sekaligus menimbulkan erosi dan bahaya banjir. Ironinya perbuatan yang merusak ini dilakukan oleh oknum yang notabene sebagai anggota aparat keamanan, maka tidak satupun warga desa yang berani menegurnya apalagi melaporkan kepada pihak yang berwenang.

2. Potensi Lahan

Lahan desa seluas 780 ha tersebut, mempunyai tingkat kesuburan sedang dan mempunyai potensi dan peluang untuk pertumbuhan tanaman yang cukup baik. Hampir semua jenis tanaman yang ditanam oleh petani baik jenis tanaman pangan maupun tanaman perkebunan, terlihat dapat tumbuh baik dan berkembang dengan subur secara alamiah, seperti : padi, sayur-

sayuran, dan palawija sedang tanaman perkebunan, seperti : kopi, kayu manis, karet, coklat, kelapa, pinang, dan lainnya telah dapat tumbuh/hidup dengan subur.

Permasalahannya walaupun potensi lahan secara alami cukup subur, namun para petani merasa pesimis ataupun putus asa, karena berbagai tanaman pangan dan perkebunan yang sudah dapat tumbuh dan berkembang baik, telah banyak dirusak/diserang oleh hama babi hutan. Masalah hama babi ini, hingga kini belum bisa diatasi dengan tuntas karena masalah ini yang jelas terkait langsung dengan pendapatan/penghasilan mereka. Jadi, sepanjang hama babi tersebut masih mengganggu, sepanjang itu pula akan membuat pusing/bingung para petani. Sementara, upaya-upaya untuk menanggulangi (menjaring/membasmi) hama ini, sudah dilakukan, tapi sejauh ini belum maksimal karena tidak dilakukan secara simultan, apalagi alat yang dipergunakan masih sederhana. Oleh karena itu, dengan adanya gangguan hama babi para petani berpaling pada tanaman nilam, berdasarkan pengalaman, menunjukkan bahwa jenis tanaman ini sangat tidak disukai babi dan secara ekonomi lebih menguntungkan setelah daunnya diproses menjadi minyak nilam (atsiri), keuntungannya jauh lebih tinggi dibanding jenis tanaman lain.

Permasalahan yang dialami banyak petani sekarang, untuk mengembangkan usaha budidaya tanaman ini perkiraan biayanya cukup tinggi, mulai dari : bibit, pupuk, obat-obatan, dan peralatan (gunting stek, sprayer,dll.), sampai pada alat penyulingan (destilasi)-nya, mencapai jumlah jutaan rupiah. Sebagai contoh, untuk mengembangkan budidaya nilam pada lahan seluas 1 ha biayanya dapat mencapai ratusan ribu rupiah. Modal tersebut, jelas tidak dapat dipenuhi oleh sebagian besar petani. Akhirnya, salah satu alternatif yang ditempuh, beberapa tokoh masyarakat/ulama setempat dan didukung kepala desa, mengajukan usulan untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat (dalam hal ini pihak BAPPENAS), dengan harapan agar bisa diterima, supaya budidaya nilam dapat dikembangkan secara luas. Usulan ini ditanggapi secara serius oleh pihak BAPPENAS, dan ditindak-lanjuti dengan memberikan bantuan dengan sistim dana bergulir melalui Program Iptekda. Sebagai pelaksana program ditunjuk Tim Iptekda dari PAPIPTEK-LIPI. Sayangnya begitu program ini selesai para petani kurang apresiatif secara serius baik ilmu penegtahuannya maupun teknologi yang sudah diserap. Dan yang lebih prihatin pinjaman dana bergulir yang

diterapkan ternyata tidak berjalan lancar justru sebaliknya “macet”. Akibatnya lahan yang sudah di tebas rintis beberapa ha luasnya kini berubah lagi menjadi alang-alang alias lahan tidur.

IV. PRASARANA

Satu lagi yang menjadi permasalahan dan perlu kiranya mendapat perhatian yaitu tersedianya prasarana jalan dan transportasi yang cukup memadai, karena hal ini merupakan urat nadi bagi tumbuhnya berbagai kegiatan sosial-ekonomi dan lainnya. Tapi prasarana jalan yang ada dirasakan sangat tidak mendukung untuk lebih beraktivitas dalam membangun kegiatan perekonomian desa, sehingga terkesan Kebijakan pemerintah (c.q. Departemen Transmigrasi) dalam penempatan lokasi pemukiman transmigran, tidak terencana secara matang boleh dibilang arogan, artinya, bahwa Departemen Transmigrasi hanya berperan sebagai fasilitator/administrator, yaitu memindahkan penduduk pulau jawa dari tempat yang padat ke tempat yang sepi setelah itu dianggap selesai. Padahal, persoalan-persoalan mdatang dengan kondisi seperti ini lebih berat, diantaranya: lokasi jauh dari jalan perkotaan, medannya berat, sanitasi dan air bersih tidak memadai dan sebagainya. Seharusnya, untuk membuka pemukiman transmigrasi baru, diperlukan keterkaitan banyak pihak, terutama dari pemerintah (Departemen Pertanian; PU; Kehutanan; Pemda, dll.) paling tidak dapat memudahkan untuk membuka peluang-peluang usaha kegiatan sosial dan ekonomi, bukan sebaliknya menjadi permasalahan sosial yang berkepanjangan.

Masalah lain yang terkait langsung dengan prasarana jalan adalah masalah transportasi. Kendatipun angkutan umum yang ada dapat beroperasi, tapi kelihatannya bersifat sementara seolah-olah keberadaannya dipaksakan, sebab pengalaman menunjukkan dengan kondisi jalan seperti ini seringkali terjadi kerusakan pada bagian shockbreaker atau terotnya. Apalagi kendaraan jenis angkutan tersebut jumlahnya terbatas, hal ini setidaknya akan mengganggu perjalanan banyak orang sedang batas waktu beroperasinya cukup singkat (hanya sampai menjelang Mahgrib), setelah itu tak ada lagi kendaraan yang beroperasi sebagai kendaraan angkutan. Jadi, selama permasalahan prasarana jalan dan transportasi masih menjadi kendala umum selama itu pula produktivitas petani akan menurun hal ini tentunya

berdampak langsung pada kegiatan perekonomian desa. Sebagai contoh, tercermin dari tingkat pendapatan petani trans yang masih begitu minim (perhatikan kembali Tabel-5), bahkan sampai saat inipun mereka belum juga mampu meningkatkan penghasilannya hingga mencapai taraf pendapatan yang memadai, untuk mencukupi/memenuhi kebutuhan hidupnya.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mencermati kondisi desa cenderung menggambarkan desa yang sarat dengan berbagai permasalahan, yang mana \pm 18 tahun lamanya desa ini masih juga tergolong desa tertinggal (miskin), maka dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan dan rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai permasalahan penduduk yang secara evolusi meninggalkan desa yang ber-migrasi ke kota-kota lain atau mungkin ke lokasi transmigrasi lain dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa masyarakatnya belum menyadari arti dari program transmigrasi. Untuk itu bagi instansi terkait (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah) yang menangani masalah transmigrasi disarankan untuk lebih selektif dalam menentukan calon transmigran agar tidak terjadi eksodus, seperti yang terjadi di desa "Mekar Jaya". Selain itu sebelum calon diberangkatkan dilakukan pengarahan dan pembinaan mental secara intensif bila perlu diberikan sangsi.
2. Di bidang pendidikan, sebagaimana diuraikan, kebanyakan anak-anak transmigran hanya dapat menyelesaikan pendidikannya sampai pada tamatan SD saja. Hal ini disadari karena penghasilan orang tua mereka sebagai petani sangat minim. Untuk itu agar anak-anak bangsa ini dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau minimal tamat SLTA. Perlu dibuat suatu kebijakan pendidikan secara khusus dari Dinas Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Pemda setempat, agar dapat dibebaskan dari Iuran SPP dan buku-buku pelajaran sampai tingkat SLTA.
3. Sebagaimana diketahui sebagian besar pekerjaan utama mereka hanya petani sehingga penghasilannya pun mengandalkan dari bertani, sedangkan penghasilan dari bertani sangat rendah belum mencukupi standar kehidupan sehari-hari artinya masih di bawah garis kemiskinan. Selain itu ketrampilan yang mereka miliki masih rendah baik secara teknis

maupun teoritis. Sedangkan hasil-hasil pertanian yang mereka dapatkan pemasarannya masih sulit. Penanggulangan sementara sudah dilakukan pembinaan teknis dan bantuan modal bergulir, namun kenyataan yang dihadapi terbentur pada perilaku manusianya (kurang rasa tanggung jawab, tidak disiplin, kurang rasa kebersamaan dsb). Hal ini perlu dicari solusinya, minimal melakukan pendekatan komunikasi aktif melalui berbagai pertemuan. Sedangkan untuk meningkatkan pemasaran hasil-hasil pertaniannya selain di aktifkannya kembali KUD dan membentuk jaringan informasi pasar melalui jaringan kerja antara Kepala Desa - KUD- Pemda setempat dan Kadin Kabupaten.

4. Mengenai potensi lahan tidak ada masalah, karena berbagai tanaman dapat tumbuh dengan baik dan subur, hanya yang menghambat adalah masalah babi hutan. Berdasarkan pengalaman yang ada hampir semua tanaman habis dimakan babi hutan. Untuk itu dari pengalaman tersebut kelihatannya yang bisa diharapkan dan lebih menguntungkan adalah budidaya tanaman nilam dibanding tanaman-tanaman lainnya dan lagi babi hutan tersebut tidak suka/doyan dengan tanaman nilam. Keuntungan lainnya secara ekonomis tanaman ini lebih menguntungkan dari hasil penjualan minyaknya, oleh karenanya perlu dikembangkan lebih lanjut.
5. Sementara ini prasarana yang ada terutama prasarana fisik (jalan) sangat tidak kondusif antara lain: jauh dari lokasi jalan raya, sanitasi dan air bersih tidak memadai, jalan berbatuan dan bergelombang, jembatannya tidak layak dsb. Untuk itu perlunya perbaikan jalan dan jembatan penyeberangan secara permanen agar memudahkan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Harian, Kompas, 7 Desember 2000
2. *Indikator IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)*, PAPIPTEK-LIPI, Jakarta, 1998.
3. Nasution, Darwin (Dir. Pembinaan Daerah Transmigrasi Direktorat Jenderal Transmigrasi), *program terpadu transmigrasi dengan program KKB di daerah transmigrasi, Lokakarya, Peningkatan Program KKB di Daerah Transmigrasi (18-20 Januari 1982)*, Jakarta, 1982.
4. Sasongko, Rambat Nur dan Sumarsih, *Arti kehadiran transmigrasi dalam peningkatan taraf pendidikan masyarakat pedesaan (Studi kualitatif naturalistik di daerah, kuro tidur, kab. bengkulu utara)*, Fak.Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, 1993.
5. Tirtosudarmo, Riwanto (penyunting), *Dinamika Pendidikan dan Ketenagakerjaan Pemuda di perkotaan Indonesia*, PPT-LIPI dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.